

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum tata kelola perguruan tinggi negeri serta implikasinya terhadap otonomi akademik dan non-akademik. **Tujuan penelitian** ini adalah menemukan jawaban atas kebijakan dan praktik tata kelola akademik dan non-akademik serta ditemukannya dukungan alternatif konsep dan praktik tata kelola perguruan tinggi dari kajian peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi dan peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara. **Metode penelitian** menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan data sekunder, berupa tinjauan kepustakaan yang didukung dengan pandangan dan argumentasi dari pakar dengan teknik wawancara secara langsung dengan pimpinan Ditjen Dikti, Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi, Anggota Senat PTBH (ITB, UGM, IPB, UI, UPI, USU, UNAIR, UNPAD, UNDIP, UNHAS, ITS). Untuk menguji konsep dan pola pikir pakar peneliti melakukan studi banding di dalam negeri. Analisis data menggunakan kualitatif dengan mengkaji konsep ideal (menurut peraturan perundangan, observasi dan dokumentasi) sehingga hasil yang diperoleh sangat sah. **Penelitian terdahulu** pernah dilakukan Puji Mudiana (2009) "*Impact of educational Legal Entity Act on Indonesian Higher Education*". Liza Rohana Yulida (2010) "*Tinjauan Tentang Peralihan Bentuk Hukum PTN menjadi BHP menurut UU No.9 Tahun 2009*". Dengan dilakukannya **penelitian ini diharapkan** dapat memecahkan praktik tata kelola perguruan tinggi ideal di perguruan tinggi agar pimpinan dan civitas akademika dapat mendefinisikan cita-cita (*goals*), mengimplementasikannya, mengelola institusi dan memantau pencapaian hasilnya (*achievements*). **Hasil penelitian** ini menyimpulkan bahwa tata kelola PTN dalam rangka otonomi akademik, masih terlalu di dominasi oleh pemerintah. PTN badan hukum belum sepenuhnya diberikan kewenangan membuka program studi, penerimaan mahasiswa, penetapan kurikulum, statuta, pemilihan pimpinan, pemberian DP3 dan pengangkatan guru besar. Dalam otonomi non akademik juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan seperti struktur organisasi, kepegawaian, keuangan, dan kerjasama internasional.

**Kata Kunci:** Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri, Otonomi Akademik dan Otonomi Non-Akademik

## **Abstract**

*This study examines the laws and regulations that form the legal basis of governance of state universities and their implications for academic and non-academic autonomy. The purpose of this study is to find answers to policies and practices of academic and non-academic governance and find alternative support of university management concepts and practices from the study of laws and regulations on higher education and legislation on state finance. The research method used a normative juridical approach with emphasis on secondary data, in the form of library review supported by views and arguments from experts with direct interview techniques with the Directorate of Higher Education, Secretary of Higher Education Council, Senate Members of PTBH (ITB, UGM, IPB, UI, UPI , USU, UNAIR, UNPAD, UNDIP, UNHAS, ITS). To test the concepts and mindset of the research experts to conduct comparative studies in the country. Data analysis using qualitative by studying the ideal concept (according to regulation, observation and documentation) so that the result obtained is valid. Previous research has been done by Puji Mudiana (2009) "Impact of educational Legal Entity Act on Indonesian Higher Education". Liza Rohana Yulida (2010) "Review of the Transition of Legal Form of PTN into BHP according to Law No.9 Year 2009". By doing this research is expected to solve ideal college governance practice in college so that the leadership and academic community can define the goals (goals), implement them, manage the institution and monitor the achievement of the results (achievements). The results of this study conclude that the governance of state universities in the context of academic autonomy, is still too dominated by the government. PTN legal entities have not been fully authorized to open courses, admissions, curriculum setting, statutes, leadership elections, granting of DP3 and appointment of professors. In non-academic autonomy is also not yet fully implemented such as organizational structure, staffing, finance, and international cooperation.*

**Keywords:**        **State University Administration, Academic Autonomy and Non-Academic Autonomy**